



**LAPORAN SINGKAT  
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

---

Tahun Sidang	: 2023– 2024
Masa Sidang	: V
Jenis Rapat	: <b>Rapat Dengar Pendapat Umum</b>
Hari/Tanggal	: Rabu, 10 Juli 2024
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat BAKN RI
Acara	: Dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terkait dengan Pengelolaan PNBPN
Ketua Rapat	: H. Wahyu Sanjaya, SE
Sekretaris	: Mardi Harjo, S.E., M.Si
Hadir Pimpinan	: 1. H. Wahyu Sanjaya, SE 2. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno 3. Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.
Hadir Anggota	: 1. H. Wahyu Sanjaya, SE 2. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno 3. Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si. 4. Ir. H. Irwan Ardi Hasman 5. Dr. H. M. Amir Uskara, M.KES. 6. Mukhamad Misbakhun S.E.M.H. 7. Ahmad Najib Qodratullah. S.E. M.M
Hadir Tamu	: 1. Faisal Basri, S.E., M.A (Pakar Ekonomi, sebagai narasumber) 2. Dr. H. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si (Pakar Ekonomi, sebagai narasumber) 3. Dr.Tauhid Ahmad, ME (Direktur <i>Eksekutif Institute for Development of Economis and Finance</i> (INDEF), sebagai narasumber)

**KESIMPULAN / KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAKN DPR RI dengan Pakar/Peneliti dibuka pada pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Ketua BAKN H. Wahyu Sanjaya, S.E. dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Paket Meeting pada hari ini adalah dalam rangka mendapatkan masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pakar/Peneliti untuk memberikan paparan terkait dengan pengelolaan PNBP.
4. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pimpinan dan Anggota BAKN DPR RI untuk menyampaikan usulan atau tanggapan terhadap agenda rapat hari ini sebagaimana yang telah disampaikan.

## **II. KESIMPULAN**

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari RDPU Pakar terkait pengelolaan PNBP diantaranya:

### **Faisal H Basri, S.E. M.A.**

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap penerimaan negara berkisar antara 20-22% setiap tahunnya. Presentase tersebut dapat dikatakan relatif stabil dan cukup proposional.
2. Komposisi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pada tahun 2023 didominasi oleh sektor PNBP sumber daya alam. Penerimaan kedua didapat dari pendapatan BLU dan pendapatan kekayaan negara dipisahkan yang diperoleh dari dividen BUMN.
3. PNBP SDA cenderung mengalami kenaikan karena adanya kenaikan komoditi. Berbagai permasalahan terkait dengan PNBP SDA yang bersumber dari bidang perikanan disebabkan karena adanya illegal fishing.
4. Cadangan minyak di Indonesia mengalami tren penurunan dari tahun 1980 ke tahun 2020 jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti China, Vietnam dan Malaysia.
5. Data menunjukkan bahwa jumlah eksport Nikel ke China tidak sama dengan jumlah import Nikel di China yang berasal dari Indonesia.

### **Dr. H. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc. S.H. M.Si**

1. Penerimaan Pengelolaan Negara Bukan Pajak bersumber dari beberapa sektor penerimaan diantaranya Pemanfaatan SDA, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan Hak Negara Lainnya.
2. Beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan PNBP utamanya yang bersumber pada PNBP SDA adalah permasalahan perizinan. Perlunya pengawasan dari pemerintah apakah pengawasan pemerintah terkait

dengan izin usaha pertambangan serta izin usaha mineral dan gas sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. *Good Governance* yang baik pada perusahaan BUMN dan juga pada BLU dapat mendorong terlaksananya optimalisasi penerimaan PNBP.
4. Pengelolaan PNBP yang baik diharapkan dapat disertai dengan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Beberapa PNBP yang didapatkan dari pelayanan diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kebermanfaatn bagi masyarakat. Dalam hal peran negara dalam mensejahterakan rakyat, pemerintah harus meninjau kembali peran negara sesuai dengan Undang-undang negara 1945 dimana negara harus hadir melayani masyarakat.

**Dr. Tauhid Ahmad. M.E.**

1. Penurunan PNBP pada tahun 2018 sampai dengan 2024 disebabkan oleh pelemahan harga komoditas (minyak bumi dan batubara), Rendahnya *lifting* minyak dan gas bumi, Pendapatan penjualan hasil tambang DAN Penurunan kinerja BLU. Sebaliknya perbaikan terjadi dari sisi kenaikan harga ICP di tahun 2024 dan setoran deviden BUMN.
2. Isu strategis minyak dan gas bumi diantaranya adalah PNBP Minyak dan Gas Bumi sangat sensitive Terhadap harga ICP sehingga “shock” geopolitik global dan ekonomi dunia (China) akan sangat besar pengaruhnya, namun disisi lain kenaikan harga ICP akan mempengaruhi aktivitas hulu migas; *Declined period* dan *unplanned shutdown* akan berdampak penurunan produksi dalam jangka panjang; Kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan hulu migas masih menjadi tantangan utama.
3. Beberapa isu permasalahan terkait dengan pengelolaan PNBP diantaranya:
  - a. Terdapat potensi penurunan PNBP pada beberapa tahun mendatang manakala kondisi perekonomian dunia masih stagnan.
  - b. Ketergantungan PNBP pada harga komoditas menyebabkan volatilitas yang tinggi sehingga perlu penguatan dan terobosan PNBP berbasis Non Sumberdaya Alam.
  - c. Meski temuan BPK Terhadap PNBP relative “akomodatif” namun perlu sesegera mungkin ditindaklanjuti oleh K/L terkait

- d. Perlunya upaya PNBPN berbasis layanan, penguatan BUMN berbasis deviden, hingga pemanfaatan barang milik negara untuk peningkatan PNBPN pada masa mendatang.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada hari Rabu, 10 Juli 2024 pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 10 Juli 2024

a.n. **PIMPINAN**  
**KABAGSET BAKN,**



**MARDI HARJO, S.E., M.Si**  
**NIP. 19700915 1998 03 1006**